

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN.

Inovasi tidaklah asing dalam berbagai aspek kehidupan serta inovasi juga merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat baik itu yang menyangkut individu, masyarakat, organisasi maupun negara. Pada titik dimana dalam kebijakan sudah tidak dapat memenuhi tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin pesat dan menuju ke arah global, maka inovasi diperlukan untuk memberikan penguatan pada sektor-sektor kebijakan dengan spektrum yang lebih luas.¹

Di Indonesia penerapan regulasi mengenai inovasi terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa inovasi daerah diperlukan dalam rangka untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bisa melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk dari pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Inisiatif inovasi ini dapat dilakukan oleh pejabat daerah manapun seperti kepala daerah, anggota DPRD, aparatul sipil negara, perangkat daerah serta anggota masyarakat di daerah tersebut.

Pada level pemerintahan pusat maupun daerah, kemampuan dalam berinovasi terutama pada inovasi kebijakan yang merupakan bagian dari

¹ Ahmad Sururi, 2017, *Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris)*, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Serang Raya.
Email: ahmadbroer@gmail.com.

kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya baik dalam skala lokal maupun nasional dengan didukung oleh kreativitas birokrasi di berbagai tingkatan. Kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan inovasi ini juga mutlak diperlukan. Inovasi kebijakan sendiri memiliki tujuan meningkatkan daya saing, memberikan dampak dan manfaat bagi kepentingan publik. Inovasi bahkan menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk perubahan dimasa sekarang ini.²

Inovasi yang dilakukan pada suatu daerah akan mendorong majunya daerah tersebut dibandingkan daerah lain yang belum melakukan inovasi. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan untuk mendorong setiap kegiatan yang bersifat inovatif pada daerah tersebut agar memajukan daerahnya serta mensejahterahkan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya pelaksanaan otonomi daerah , kegiatan inovasi di daerah-daerah Indonesia juga semakin berkembang. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya meliputi berbagai sektor dengan tujuan yang beragam, inovasi yang biasanya dilakukan biasanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

² Agus Dwiyanto (2015) Dalam Tri Widodo Wahyu Utomo, 2016, Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu Dan Praktek Administrasi Publik Di Indonesia, Laskar Inovasi Deputi Inovasi Administrasi Negara.

³ Bappenas Working Papers Volume II No.2-Mei 2019

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi daerah seluas-luasnya mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya dalam hal ini daerah yang bersangkutan seperti kabupaten/kota, menjadi indikator pertama yang mengharuskan seorang pemimpin mampu menciptakan sebuah inovasi, ide maupun gagasan baru yang mendukung proses pencapaian tujuan bersama. Inovasi ini menjadi suatu kebutuhan bahkan juga sebuah keniscayaan bagi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Geliat maupun sprit birokrasi akan menjadi semakin maju dalam mencapai visi dan misi.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak dalam pelayanan publik yang diharuskan melakukan inovasi dan pembangunan daerah. Inovasi selain bermanfaat untuk meningkatkan daya saing daerah juga meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan memiliki peranan pada perencanaan pembangunan daerah yang merupakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut.⁴

Kota Jambi juga merupakan tujuan utama dari aktivitas ekonomi, sosial dan budaya juga tidak terlepas pada terciptanya inovasi dan pembangunan, sehingga Kota Jambi juga menghadapi berbagai masalah, selain permasalahan infrastruktur dan utilitas perkotaan, masalah lainnya yaitu kesenjangan dan

⁴ Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, M. Makmur, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol.4 No.2, 2015, Hlm.231-232

ketidakmerataan pembangunan serta minimnya pembangunan fasilitas umum dan pembangunan dilingkungan masyarakat. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan lingkungan serta kesadaran gotong royong yang berkurang pada masasekarang ini. Dari permasalahan tersebut, inovasi yang dibangun akan bertujuan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga nantinya masyarakat di Kota Jambi dapat menikmati infrastruktur dan utilitas lingkungan yang memadai dan merata.⁵

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada maka Walikota Jambi menciptakan inovasi baru yaitu program Bangkit Berdaya (Bangun Kelurahan Secara Intensif Dan Terpadu Yang Berazaskan Swadaya). Diharapkan dengan adanya inovasi bangkit berdaya ini mampu mengakselerasi pembangunan serta mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah yang ada di Kota Jambi. Bangkit berdaya ini merupakan program inovasi percepatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah.

Kesenjangan dalam pembangunan merupakan sebuah masalah yang selalu terjadi disetiap kota tidak terkecuali di Kota Jambi. Kota Jambi yang merupakan wajah ibukota provinsi serta barometer dari daerah-daerah lainnya, dengan melihat ini tentunya Kota Jambi merupakan prioritas utama pembangunan. Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan pembangunan tersebut maka diperlukan juga penanganan yang komprehensif dari pemangku kepentingan. Berpijak pada salah satu misi Walikota Kota Jambi adalah

⁵https://siko.jambikota.go.id/storage/2559/6181e7fef1447_Proposal-bangkit-berdaya.pdf. Proposal Inovasi Bangkit Ebrdaya Kota Jambi, diakses 23 november, pukul 10.00 WIB

membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan. Guna mewujudkan misi pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah Kota Jambi telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Bangkit Berdaya ini.

Program inovasi Bangkit Berdaya termasuk salah satu program yang menjadi unggulan Pemerintah Kota Jambi yang telah diakui secara nasional bahkan program ini telah mendunia sejak diberlakukannya. Inovasi bangkit berdaya sendiri telah masuk dalam 30 jajaran besaran inovasi dunia. Dengan adanya program Bangkit Berdaya diharapkan mampu menanggulangi masalah klasik yang menjadi permasalahan di Kota Jambi yang kualitas dan kuantitas utilitasnya yang masih rendah.⁶

Salah satu program inovasi pemerintah yang juga memiliki persamaan dengan Bangkit Berdaya yaitu program kampung tematik di Kota Semarang, salah satunya di Kecamatan Tembalang. Program ini merupakan inovasi dari pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi masalah permasalahan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat disana. Program ini juga dikhususkan untuk peningkatan lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar permukiman.⁷ Apabila suatu kelurahan ingin mendapatkan bantuan kampung tematik, setidaknya kelurahan tersebut ada potensi dan layak untuk dikembangkan, maka kelurahan tersebut akan ikut program ini. Program kampung tematik dengan program bangkit berdaya yaitu sama-sama

⁶ <https://jambikota.go.id/new/2017/11/14/bangkit-berdaya-inovasi-dan-solusi-akselerasi-pembangunan-kota-jambi/>, Bagian hubungan masyarakat setda Kota Jambi, diakses 23 November 2021, pukul, 11.00 wib

⁷ Sukirno, Gerbang Hebat-Pemerintahan Kota Semarang-Kampung Tematik, diakses 25 November 2021, 09.00, <http://gerbanghebat.semarangkota.go.id/home/hal-tematik/1>

memberdayakan masyarakat dengan tujuan meyejaterahkan masyarakat. Namun, yang menjadi perbedaannya yaitu program tematik juga bisa menjadi wisata kampung di kelurahan yang mendapatkan bantuan, sedangkan bangkit berdaya adalah untuk membangun serta membantu pembangunan di masyarakat dalam infrastruktur sarana dan prasarananya.

Bangkit berdaya ini sangat inovatif untuk meningkatkan semangat gotong royong pada masyarakat yang belakang sering ditinggalkan. Bahkan juga menimbulkan kesadaran di masyarakat dalam partisipasi untuk pembangunan serta juga meningkatkan perekonomian di lingkungan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah Kota Jambi dapat menekan anggaran dibidang infrastruktur terutama pada jalan lingkungan karna dibantu oleh kegiatan bangkit berdaya dan gotong royong dari masyarakat. Bangkit berdaya juga diharapkan mampu mengembangkan semangat dalam berswadaya dan memiliki rasa terhadap obyek yang dibangun bersama pemerintah di Kota Jambi.⁸

Munculnya kegiatan bangkit berdaya ini merupakan kegiatan yang memiliki konsep pelibatan secara aktif peran masyarakat, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan. Program ini bahkan berdampak langsung pada kebersamaan, gotong royong, sosial, ekonomi, fisik, infrastruktur sarana prasarana serta utilitas lingkungan. Bantuan yang nantinya diterima yaitu berupa bahan material atau bahan bangunan yang digunakan untuk membangun infrastruktur yang bermasalah dilingkungan masyarakat seperti pembangunan jalan, drainase atau untuk pembangunan

⁸ Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu Berazaskan Swadaya.

yang lainnya. Pada observasi awal di lapangan ditemukan berbagai macam pandangan baik dari masyarakat maupun tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program bangkit berdaya ini.

Program Bangkit Berdaya ini juga khusus diperuntukkan untuk lingkungan RT yang usulannya belum dapat diakomodir pada saat Musrenbang Pemkot. Meskipun begitu, program ini mampu menciptakan pembangunan yang merata berbasis kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan supaya fokus pada pengembangan sarana prasarana dan utilitas masyarakat. Manfaat yang didapatkan dengan adanya program bangkit berdaya ini ada banyak, selain memang menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong-royong dalam masyarakat, kegiatan ini juga sekaligus menghemat anggaran. Karena dalam 1 tahun, pemerintah kota Jambi hanya mengeluarkan anggaran dana sebesar Rp. 7.5 miliar untuk membangun jalan, drainase ataupun infrastruktur lainnya. Ini dikarenakan pengerjaan tersebut dilakukan oleh masyarakat secara suka rela dan gotong-royong tanpa digaji ataupun mendapatkan honor dalam jumlah tertentu.⁹

Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis bangkit berdaya 2016,¹⁰ tujuan dari bangkit berdaya secara umum merupakan upaya pemerataan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan Rukun Tetangga (RT) dengan melalui partisipatif masyarakat dalam wilayah Kota Jambi. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

⁹ Bagian Humas Setda Jambi

¹⁰ Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bangkit Berdaya Tahun 2016

Ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan program bangkit berdaya antara lain : a.) Keadilan yaitu menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban, b.) Kemanfaatan yaitu dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan dan fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti, c.) Keterpaduan yaitu mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis, d.) Kemitraan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak, e.) Keterbukaan, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan, f.) Akuntabilitas, berbagai sumber daya yang digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif, g.) Partisipatif, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang digunakan, h.) Keberlanjutan, dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubid Kesejahteraan Masyarakat mengenai Bangkit Berdaya ini bahwasanya hampir seluruh kecamatan yang sudah mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan sudah hampir seluruhnya terlaksana. Bahkan bantuan Bangkit Berdaya bisa diajukan lagi apabila keluhan tersebut masih membutuhkan bantuan, namun usulan tersebut

¹¹ Dinamika Pembangunan Kota Jambi Tahun 2016,

bisa terealisasi kembali untuk tahun depannya. Tetapi ada beberapa kelurahan di kecamatan yang tidak mengusulkan bantuan Bangkit Berdaya dikarenakan sarana dan prasarana mereka sudah berjalan baik serta tidak membutuhkan bantuan ini karena sebelumnya mereka sudah melaksanakan program Bangkit Berdaya.¹²

Inovasi program Bangkit Berdaya bahkan menjadi salah satu wadah bagi masyarakat di kelurahan untuk bekerja sama dalam membangun kelurahannya. Ketua RT dan kelurahan akan berperan dalam mengawasi jalannya pengerjaan sarana dan prasarana seperti pengerjaan jalan maupun drainase. Dalam hal ini pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh kecamatan di Kota Jambi yang telah atau dalam masa pengerjaan jalan.¹³ Tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dan pembangunan program bangkit berdaya yang tidak selalu berjalan mulus dan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaanya.

Dari informasi yang telah diperoleh, di Kelurahan Telanaipura masih ada beberapa RT yang masih menunggu usulan untuk memperbaiki jalan dikarenakan ada refocusing anggaran, maka karena hal tersebut baru hanya satu rt yang bisa melakukan pembangunan jalan di tahun ini. Padahal masih ada beberapa titik yang memang harus diperbaiki bahkan ada jalan yang belum pernah dibangun sebelumnya. Namun, karena keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan untuk pembangunan. Hal ini

¹² Doddy Maryanto, S.H, tanggal 1 November 2021 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi

¹³ Doddy Maryanto, S.H, tanggal 1 November 2021 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi

tentunya akan menjadi masalah, melihat dari kebutuhan masyarakat yang mendesak pada lingkungan rt di kelurahan mereka tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan yang penelitiannya berjudul Implementasi Program Pemerintah Kota Jambi Menuju Bangkit Berdaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Bangkit Berdaya yang ditujukan untuk mendorong pembangunan Kota Jambi memiliki prinsip yang terbuka dari pemerintah untuk masyarakat mengenai masukan, saran, maupun mengenai persoalan anggarannya. Berbagai manfaat dari Program Bangkit Berdaya saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat di hampir seluruh kelurahan maupun kecamatan di Kota Jambi. Hal ini sudah terbukti dari survey yang dilakukan dalam 4 tahun semenjak tahun 2013 yang mengalami kenaikan pesat sampai 86,70%. Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya ini sudah tepat terlaksana sesuai peraturan dimana pemerintah benar-benar menjalankan program sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan Walikota Jambi.¹⁴

Penelitian terdahulu selanjutnya menunjukkan program bangkit berdaya yang berfokus pada grand inovasi daerah sebagaimana di dalam aturan peraturan pemerintah mengenai inovasi daerah. Grand inovasi ini salah satunya yaitu program bangkit berdaya yang diciptakan oleh pemerintah Kota Jambi, inovasi yang pelaksanaannya sudah dapat dikatakan terlaksana sepenuhnya

¹⁴ Chintya Pertiwi, *Implementasi Program Pemerintah Kota Jambi Menuju Bangkit Berdaya*, Skripsi, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, UIN Suska, 2019.

namun masih adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.¹⁵

Pada penelitian terdahulu selanjutnya ditemukan bahwa penelitian ini memaparkan realisasi bangkit berdaya yang dilakukan di kelurahan Kenali Besar yang Sebagian telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota serta masyarakat juga telah terlibat aktif dalam melaksanakan bangkit berdaya sesuai sasaran utama dalam Program Bangkit Berdaya ini. Walaupun ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam partisipasi gotong royong tetapi mereka ikutserta dalam hal yang lain seperti memberi sumbangan suka rela (swadaya). Dijelaskan juga dampak program bangkit berdaya di Kelurahan Kenali Besar sudah berpengaruh terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat disana.¹⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas memiliki kemiripan yaitu membahas mengenai Bangkit Berdaya. Akan tetapi, pada penelitian tersebut belum ada yang mengkaji mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program bantuan pemerintah bangkit berdaya ini dalam implementasi kebijakannya. Diketahui seluruh Kelurahan maupun kecamatan di Kota Jambi hampir semuanya sudah mendapatkan bantuan bangkit berdaya termasuk salah satunya kelurahan telanipura. Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Telanaipura juga menjadi salah satu kecamatan dan kelurahan dengan penerimaan bantuan terbanyak. Namun dari informasi yang telah

¹⁵ Ani Safitri, *Grand Inovasi Pemerintah Daerah (Studi Kebijakan Tentang Program Bangkit Berdaya Kota Jambi)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, UIN Jambi, 2020.

¹⁶ Julian Elita, *Realisasi Program Kelurahan Secara Intensif Dan Terpadu Berazaskan Swadaya (Bangkit Berdaya) Dikelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, UIN Jambi 2021

diperoleh, di Kecamatan Telanaipura yaitu Kelurahan Telanaipura masih ada beberapa RT yang masih menunggu usulan untuk memperbaiki jalan dikarenakan ada refocusing anggaran, maka karena hal tersebut baru hanya satu rt yang bisa melakukan pembangunan jalan di tahun ini. Padahal masih ada beberapa titik yang memang harus diperbaiki bahkan ada jalan yang belum pernah dibangun sebelumnya. Jalan lingkungan yang belum diperbaiki di beberapa titik tersebut belum dapat diperbaiki di tahun 2021 dan harus mengusulkan kembali di tahun depannya¹⁷. Sedangkan Kecamatan Alam Barajo menjadi salah satu kecamatan di seluruh Kota Jambi yang banyak menerima Program Bangkit Berdaya ini, dan Kelurahan Kenali Besar menjadi salah satu kelurahan yang juga banyak mendapatkan bangkit berdaya.

Maka dari itu, Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Telanaipura menjadi landasan peneliti mengambil penelitian dan peneliti akan melihat bagaimana pengoptimalisasi partisipasi bangkit berdaya pada kelurahan yang mendapatkan bantuan dana Bangkit Berdaya. Apakah dengan adanya Program Pemerintah Bangkit Berdaya ini menghadirkan pelibatan aktif partisipasi masyarakat di kecamatan tersebut. Karena hal tersebut sangat penting dalam pembangunan pada suatu daerah. Peneliti akan meneliti dan menjabarkan secara rinci berdasarkan fakta dan data yang didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan peneliti lakukan. Peneliti juga merasa perlu untuk dapat mengetahui dan mengkaji mengenai suatu Inovasi yang dilakukan oleh Walikota Jambi yaitu program Bangkit Berdaya

¹⁷ <https://www.jambi-independent.co.id/read/2021/09/21/15855/rp-38-juta-untuk-bangkit-berdaya-->. Diakses pada 30 November 2021.

yang merupakan salah satu terobosan besar yang akan peneliti jadikan judul penelitian yaitu **“Optimaliasi Partisipasi Masyarakat Kota Jambi Dalam Implementasi Program Kebijakan Bangkit Berdaya”**

1.2. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana partisipasi masyarakat kota jambi dalam implementasi program kebijakan Bangkit Berdaya?
2. Bagaimana dampak dari program Bangkit berdaya terhadap masyarakat Kota Jambi ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat kota jambi dalam implementasi dalam meningkatkan program Bangkit Berdaya pada swadaya di Kota Jambi.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui dampak dari program Bangkit berdaya terhadap masyarakat Kota Jambi.

1.4. MANFAAT PENELITIAN.

1. Agar menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua dan masyarakat terhadap perkembangan Kota Jambi.
2. Dapat dijadikan salah satu masukan atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. LANDASAN PENELITIAN.

1. Teori Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warganegara untuk memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan

tertentu. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikutserta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif, kreatifitas maupun dalam bentuk tenaga. Dalam berpartisipasi diperlukan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat .

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga factor pendukungnya yaitu : adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau sekelompok masyarakat), sedangkan kesempatan apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga tau kelompok dalam suatu masyarakat, walaupun telah diberi kesempatan oleh Negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika tidak ada kemauan dan kemampuan tetepi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari masyarakat, maka tdak mungki juga partisipasi masyarakat akan terjadi.¹⁸

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keikutsertaan maupun keterlibatan seseorang secara perseorangan maupun berkelompok dalam suatu kegiatan. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dibutuhkan pendekatan yang mensinergikan potensi masyarakat. Pendapat ini

¹⁸ Indra Septian Kusnaeni, 2014-Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat.

juga memerlukan perencanaan yang matang agar mendorong peran aktif dari masyarakat.

Ada dua jenis definisi partisipasi yang ada dimasyarakat yaitu : definisi pertama, partisipasi merupakan dukungan masyarakat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan oleh perencana, definisi kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a) Partisipasi langsung.

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b) Partisipasi tidak langsung.

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Ada dua bentuk partisipasi menurut Effendi yang oleh yaitu sebagai berikut :

a) Partisipasi vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien

b) Partisipasi horizontal.

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya.

Jadi menurut definisi tersebut, ukuran dari tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan program yang ada di wilayah masyarakat tersebut. Ukuran lainnya juga ada tidaknya kemauan masyarakat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan itu.

Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen kegiatan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dapat dirangkum indikator-indikator partisipasi masyarakat :

a) Ikut serta dalam mengajukan usul maupun pendapat mengenai

usaha-usaha pembangunan yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga pemerintahan yang ada.

- b) Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang program yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat tersebut.
- c) Ikut serta dalam melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik dalam bentuk tenaga, sumbangan uang maupun materiil yang lain.
- d) Masyarakat ikut serta dalam bertanggungjawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama.
- e) Ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari program yang telah dilaksanakan tersebut.

Berdasarkan system dan mekanisme partisipasi dapat dibedakan partisipasi menjadi 4 jenis yaitu :

- 1) *Participation in decision* yaitu partisipasi masyarakat dalam proses mengajukan keputusan atau usulan. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat,

secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

- 2) *Participation in implementation* merupakan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari banyaknya yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang berpartisipasi, bentuk-bentuknya berupa tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebgaiannya, partisipasi langsung atau partisipasi tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-kali atau berulang-ulang.
- 3) *Participation in benefit* merupakan partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataa kesejaterahan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil dari program pembangunan yang telah diperoleh. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemelihara dan perawatan hasil-hasil pembangunan.
- 4) *Participation in evaluation* adalah patisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan

serta hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, memberikan saran-saran, kritikan atau proses.¹⁹

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan juga merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga setiap kebijakan harus dilaksanakan dengan terencana, disusun dengan matang dan terperinci.

George C. Edward III melihat implementasi sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapatnya banyak faktor yang saling berintegrasi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut guna mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap implementasi. Variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu²⁰:

- 1) Komunikasi.
- 2) Kejelasan.
- 3) Konsistensi,.
- 4) Stuktur birokrasi

¹⁹ Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan Dan Penggaran Partisipasi*. Surakarta: Kompip Solo

²⁰ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm 136

Laster dan Stewart dalam buku Kebijakan Publik Teori dan Proses memandang bahwa implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari suatu proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur maupun teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.²¹

Solahuddin Kusumanegara dalam bukunya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dipahami secara rinci sebagai suatu proses, *output*, dan *outcome*. Implementasi juga dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai *outputs*, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan aturan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai *outcomes*. Konseptualisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.²²

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle yaitu dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut

²¹ Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori Dan Proses, (Jakarta: Media Pressindo, 2008), hal.144

²² Solahuddin Kusumanegara, *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2010). Hlm.98

mencangkup Dsejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grub termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grub, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implentasi serta kondisi-kondisi sumber daya impelementasi yang diperlukan.²³

1.6. KERANGKA FIKIR.

Program Bangkit Berdaya ini memiliki sasaran pelaksanaan untuk meningkatkan jumlah permintaan dan usulan pembangunan masyarakat yang dapat diakomodasikan oleh pemerintah Kota Jambi serta meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dengan bergotong-royong. Program ini juga diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang merata, berbasis kepada kebutuhan masyarakat diwilayah kecamatan dan

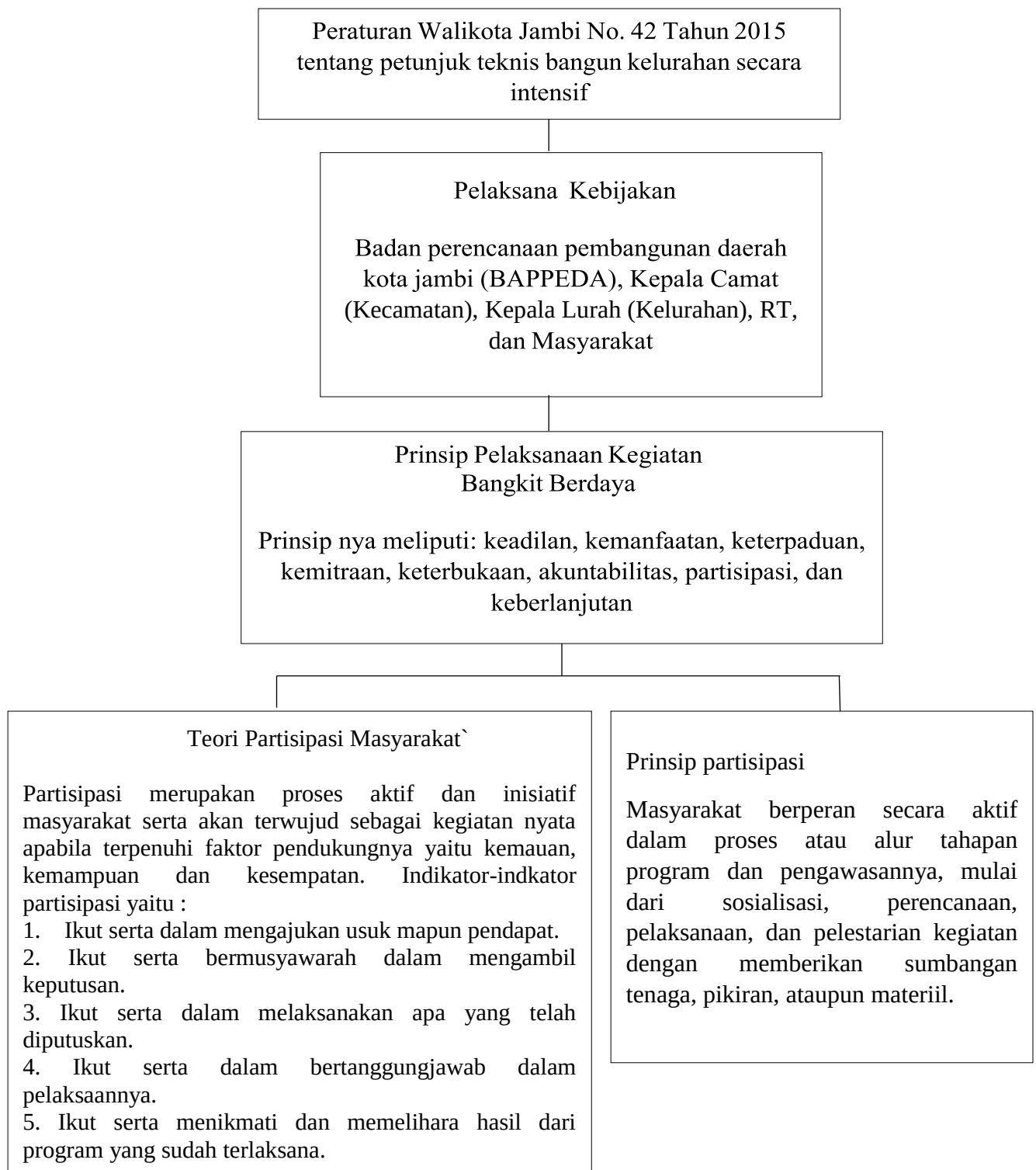
²³ Subarsono, *Analisis Kebijakan Public Konsep, Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: PustakaPelajar. 2011), Hlm.93

kelurahan supaya fokus pada pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas masyarakat.

Dengan munculnya inovasi Bangkit Berdaya merupakan suatu program yang memiliki konsep pelibatan secara aktif peran masyarakat, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan. Program ini khusus diperuntukkan bagi lingkungan RT yang usulannya belum dapat diakomodir pada Musrembang Pemerintah Kota Jambi, program ini juga berdampak langsung pada kebersamaan, gotong royong, sosial, ekonomi, fisik serta infrastruktur sarana prasarana dan utilitas lingkungan.

Inovasi Program Bangkit Berdaya juga berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kota Jambi. Program partisipasi masyarakat yang bahkan juga telah menjadi model nasional bahkan internasional tersebut telah mendapatkan sambutan positif di 11 kecamatan dalam Kota Jambi. Salah satunya di Kecamatan Telanaipura. Program Bangkit Berdaya di wilayah tersebut merupakan strategis percepatan pembangunan yang akan selalu dikembangkan, yang tidak hanya dalam bentuk kualitas fisik di masyarakat tetapi juga ditingkat administrasi serta juga pada tata kerja.²⁴

²⁴ BANGKIT BERDAYA: Salah Satu Program Bangkit Berdaya Di Kota Jambi.IST/JAMBIINDEPENDEN



1.7. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²⁵ Metode penelitian yaitu suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah suatu inovasi dari program pemerintah yaitu Bangkit Berdaya untuk pembangunan masyarakat di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana adalah kumpulan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan dari sejumlah individu atau sekelompok orang. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari informan serta menafsirkan makna data dari objek yang diteliti yaitu mengenai proses Program Bangkit Berdaya ini yang menjadi inovasi daerah dan melihat kesesuaian dari prinsip-prinsip pelaksanaannya. Setelah itu, maka hasil yang telah didapatkan akan dirangkum menjadi sebuah pembahasan dan kesimpulan dari penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Poewandri (2005), penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara dan observasi. Kirk dan

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-5, (Jakarta: sinar grafika, 2014_), hlm.17.

²⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1, (Jakarta: Gaung [Persada, 2009_), Hlm.11

Miller (dalam Moloeng) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dengan mendapatkan data yang digalinya.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Telaipura Kota Jambi karena peneliti melihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan tersebut yang menyambut baik pelaksanaan inovasi Program Bangkit Berdaya ini dengan saling gotong royong dalam membangun RT nya serta mereka juga menyumbang dana apabila ada kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program Bangkit Berdaya ini.

3. Fokus Penelitian

Suatu penelitian akan mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang telah diteliti, maka dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti harus terfokus pada suatu masalah yang akan diteliti. Dalam sebuah penelitian perlu adanya fokus penelitian. Dimana fokus penelitian tersebut bertujuan untuk memfokuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Fokus berarti membatasi kajian. Dengan menetapkan fokus masalah berarti peneliti telah melakukan pembatasan bidang kajian, yang berarti pula membatasi bidang temuan.²⁸ Agar

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

²⁸ *Ibid*, hal 109.

mempertajam penelitian kualitatif, Spradley dan Sugiyono menyatakan bahwa “fokus merupakan dominan tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Penentuan fokus berdasaeakan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial”.²⁹

Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana partisipasi Program Bangkit Berdaya di Kota Jambi. Dalam penelitian ini penulis juga akan membahas mengenai faktor apa apa saja yang menjadi keberhasilan selama Program Bangkit Berdaya diterapkan dan strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan implementasi program bangkit berdaya di Kota Jambi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini pewawancara dan responden, situasi, peristiwa serta dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan maupun tindakan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang didapatkan dalam situasi dan peristiwa meliputi ruang dan proses. Sumber data dokumentasi atau berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

a. Data primer.

Menurut Sugiyono (2013) menjelaskan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer juga didapatkan langsung dari sumbernya, diamati, serta

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*; R dan D, (Bandung; Alfabet, 2017), Hlm.29

dicatat pertama kali oleh peneliti yang melakukan penelitian. Data primer juga disebut data asli atau data baru, penulis langsung melakukan penelitian dilapangan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi, jurnal, dan dokumen.³⁰ Kemudian sumber data juga diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media dan sumber tersebut. Data yang dikumpulkan oleh peneliti menjadi sebuah penunjang dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Informan.

Teknik penentuan informan merupakan sebuah metode yang digunakan kualitatif untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi sumber informasi dan data (informan). Penentuan informan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini merupakan teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitian. Dalam hal penentuan informan yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data dilapangan.

³⁰ *Ibid*, hal 25

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ialah:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Jambi.
2. Camat Alam Barajo.
3. Camat Telanaipura.
4. 3 orang warga Kecamatan Alam Barajo Dan Kecamatan Telanaipura .

6. Teknik Pengumpulan Data.

Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut:

a. Observasi.

Observasi menurut Kartono ialah suatu ilmu yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.³¹ Observasi ini dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap dan dilakukan secara sadar tentang perilaku individu sebenarnya yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek observasi ialah Bangkit Berdaya sebagai program perbaikan sarana dan prasarana yang diciptakan dan telah diterapkan di Kota Jambi.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan sebuah pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara pada

³¹ *Ibid*, hlm.143

penelitian lebih dari sekedar percakapan berisi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Penelitian cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran informan.³²

Wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang sama tujuannya untuk mendapatkan keterangan mengenai hal yang diteliti. Adapun wawancara yang akan dilakukan ialah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan secara luwes kepada informan yang mana ini bertujuan agar arah pertanyaan lebih terbuka dan pembicaraan tidak kaku.

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar”.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental seseorang.³³ Dokumentasi juga mengumpulkan data-data atau dokumen yang diperlukan dalam menjalankan penelitian, lalu ditelaah sehingga dokumentasi tersebut dapat mendukung serta

³² *Ibid*, hlm 160

³³ *Ibid*. hal 240.

menambah pembuktian penelitian dilapangan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *handphone*, pena dan kertas.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif ialah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian- bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Spradley, 1980). Artinya semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti Martja, 2007. Miles dan Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu 1.) reduksi data; 2.) paparan data; 3.) penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁴

Adapun kegiatan reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi perekapan hasil wawancara. Pada penyajian data penelitian menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang disajikan dalam bentuk naratif. Pada pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi atau disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti- bukti yang kuat pada saat mengumpulkan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan

³⁴ *Ibid*, hlm 210.

masalah yaitu hasil penelitian dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

8. Keabsahan Data/Triangulasi

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi yaitu kombinasi berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Sementara itu, teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah trigulasi data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam peneliti.